



RENCANA KERJA (RENJA)

Tahun Anggaran 2023



INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke-hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia serta perkenan-Nya, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023, sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar mengacu pada Rencana Strategik (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Ruang Lingkup pembahasan memuat sasaran, program, kegiatan dan indikator kinerja kegiatan yang diharapkan mampu menyelaraskan visi dan misi dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dengan disusunnya Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 ini diharapkan Inspektorat dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berkelanjutan, efektif, efisien dan akuntabel.

Akhir kata semoga Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 ini bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).



Benteng, 02 Januari 2023

INSPEKTUR DAERAH,

H.A.R. ERG MAGASSING, S.H., M.H.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19630727 199303 1 014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT	
DAERAH	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah	6
2.2. Analisis Capaian Kinerja Inspektorat Daerah	20
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah.....	23
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	27
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah	27
3.2. Program dan Kegiatan	28
BAB IV PENUTUP	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah merupakan dokumen perencanaan Inspektorat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam prosesnya, penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja Inspektorat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Inspektorat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Inspektorat Daerah.

Selain itu dengan disusunnya Rencana Kerja Inspektorat Daerah ini diharapkan dapat terpantau dan terevaluasi sampai sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra). Sehingga dapat dilakukan koreksi jika terjadi penyimpangan ataupun perkembangan baru di lingkungan strategis yang perlu ditindaklanjuti atau diantisipasi di Tahun 2023.

Rencana Kerja Tahunan ini digunakan dalam membuat rencana operasional kegiatan sebagai komitmen Pimpinan untuk menyediakan sumber daya serta proses penganggaran yang selanjutnya juga digunakan untuk Service Agreement atau Komitmen Kinerja ataupun Performance Agreement yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar untuk pemantauan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan di Tahun 2023.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877);
9. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 103).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2023 adalah untuk menentukan indikatif besarnya anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang berdasarkan pada anggaran berbasis kinerja sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
- b. Untuk menentukan prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan acuan dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rumusan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ini dituangkan ke dalam 4 (empat) bab, secara ringkas sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan;
- 1.4. Sistematika Penulisan;

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2021

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah;
- 2.2. Analisis Kinerja Inspektorat Daerah;
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah;

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah;
- 3.2. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2022

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH

Inspektorat Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan evaluasi terhadap pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja.

Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2022 mencapai **93,71%** dari total anggaran sebesar **Rp. 10.064.083.400,-** (Sepuluh Miliar Enam Puluh Empat Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 9.430.852.616,-** (Sembilan Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Belas Rupiah).

Anggaran belanja tersebut di atas antara lain dimanfaatkan untuk membiayai 3 (tiga) program yang terdiri dari 10 (sepuluh) kegiatan. Realisasi capaian keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk program-program tersebut, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota bertujuan untuk mengetahui capaian kinerja dan keuangan pada perangkat daerah yang merupakan penunjang urusan pemerintahan. Alokasi anggaran pada program ini sebesar **Rp6.000.696.000,-** (Enam Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp.5.905.647.567,-** (Lima Miliar Sembilan Ratus Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada program ini sebesar

98,42%. Adapun rincian Kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang tersusun. Alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp.17.820.000,-** (Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp.14.106.200,-** (Empat Belas Juta Seratus Enam Ribu Dua Ratus Rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **79,16%**.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat Daerah. Alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp. 4.089.406.000,-** (Empat Miliar Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp. 4.050.038.257,-** (Empat Miliar Lima Puluh Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **99,04%**.

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat Daerah. Alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp. 400.000.000,-** (Empat Ratus Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp. 396.820.000,-** (Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **99,21%**.

d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi Sarana/Prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah. Alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp. 573.860.000,-** (Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp. 554.635.000,-** (Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **96,65%**.

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi jasa penunjang urusan pemerintahan daerah. Alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp. 674.910.000,-** (Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp. 649.699.620,-** (Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **96,26%**.

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPBM. Alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp. 244.700.000,-** (Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp. 240.348.490,-** (Dua Ratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **98,22%**.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program Penyelenggaraan Pengawasan bertujuan untuk mengetahui peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Alokasi anggaran pada program ini sebesar **Rp. 3.581.397.400,-** (Tiga Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar **3.129.327.849,-** (Tiga Miliar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada program ini sebesar **87,38%**. Adapun rincian Kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Kegiatan ini dilakukan secara regular/berkala sebagai bentuk pengawasan terhadap kinerja dan keuangan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. Alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp. 2.903.732.500,-** (Dua Miliar Sembilan Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp. 2.645.130.600** (Dua Miliar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **91,09%**.

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Kegiatan ini dilakukan secara khusus atau berdasarkan permintaan/pengaduan dari pihak lain diluar pengawasan terhadap kinerja dan keuangan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. Alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp. 677.664.900,-** (Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp. 484.197.249,-** (Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Sembilan Rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **71,45%**.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi ini bertujuan untuk mengetahui skor/nilai penyelenggaraan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Alokasi anggaran pada program ini sebesar **Rp. 481.990.000,-** (Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp. 395.877.200,-** (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada program ini sebesar **82,13%**. Adapun rincian kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk menetapkan kebijakan teknis terkait pengawasan yang telah dirumuskan sebagai pedoman pengawasan. Alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp. 79.257.500,-** (Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp. 73.678.700,-** (Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **92,96%**.

b. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi

Kegiatan ini merupakan kegiatan pengawasan dalam bentuk lain yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah yaitu pendampingan dan asistensi. Pendampingan dan asistensi ini dilakukan terhadap semua perangkat daerah yang membutuhkan pendampingan maupun asistens untuk lingkup Kabupaten Kepulauan Selayar. Alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp. 402.732.500,-** (Empat Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp. 322.198.500,-** (Tiga Ratus Dua Puluh Dua

Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **80,00%**.

Analisis Capaian Kinerja berdasarkan sasaran pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

1. Sasaran 1: Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah, dengan indikator sasaran kinerja yaitu:

- **Indikator Sasaran 1: Nilai SAKIP Inspektorat Daerah**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai SAKIP OPD	B	B	Tercapai

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD dilaksanakan untuk memperoleh umpan balik yang objektif untuk perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Oleh sebab itu dengan semakin meningkatnya nilai evaluasi SAKIP, diharapkan dapat mendorong OPD untuk mewujudkan pencapaian akuntabilitas kinerja hasil organisasi secara konsisten sesuai dengan yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penilaian SAKIP Perangkat Daerah dibagi menjadi 7 kategori, yaitu:

Kategori	Nilai
D	0 - 30
C	30 - 50
CC	50 - 60
B	60 - 70
BB	70 - 80
A	80 - 90
AA	90 - 100

Realisasi indikator sasaran kinerja Inspektorat Daerah telah mencapai target yang ditetapkan, dimana target nilai SAKIP di Tahun 2022 minimal B. Nilai yang diperoleh Inspektorat Daerah berdasarkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 tanggal 11 April 2022 yaitu 69,99 dengan kategori B (baik).

2. Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat, dengan indikator kinerja yaitu:

- **Indikator Sasaran: Indeks Kepuasan Layanan**

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
-	Indeks Kepuasan Layanan	100%	100%	Tercapai

Layanan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah adalah Surat Keterangan Bebas Temuan (SKBT). SKBT merupakan salah satu dokumen administrasi yang dipersyaratkan untuk dipergunakan setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam keperluan administrasi kepegawaian meliputi: Promosi Jabatan, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, penerbitan SK Pensiun, Penghargaan Satya Lencana Karya Satya, Tugas Belajar, Izin Belajar, Pengiriman Diklat Teknis/Fungsional, Penerbitan SK Jabatan Fungsional Tertentu, SK Pembebasan dan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional Tertentu, serta Penandatanganan Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Pindah Tugas dan Pensiun diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Bebas Temuan (SKBT) yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pada Tahun 2022, 1493 berkas permohonan yang diajukan dan ditindaklanjuti secara keseluruhan setelah melewati tahapan-tahapan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP). Secara keseluruhan target 100% yang ditetapkan dengan realisasi secara keseluruhan maka Inspektorat Daerah dikategorikan tercapai.

3. Sasaran 3: Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dengan indikator sasaran kinerja yaitu:

- **Indikator Sasaran Kinerja: Laporan Keuangan Inspektorat Daerah yang Tersaji sesuai SAP**

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang tersaji sesuai SAP		Sesuai	Sesuai	Tercapai

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang undangan.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan: Akuntabilitas, Manajemen, Transparansi, Keseimbangan Antargenerasi, dan Evaluasi Kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi dari Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Laporan Keuangan Inspektorat Daerah telah disusun sesuai SAP berdasarkan, karakteristik kualitatif laporan keuangan, prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan.

4. Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

- **Indikator Kinerja 1: Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) – Target Level 3**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Level Kapabilitas APIP	Level	3	Level 2	Belum Tercapai

Penilaian mandiri (Self Assesment) yang pertama atas level kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dilakukan pada Tahun 2016 setelah sosialisasi dari Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dengan hasil berada pada **Level 1**.

Pada tahun 2017, dilaksanakan beberapa program dan kegiatan untuk meningkatkan Level Kapabilitas APIP Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut. Berdasarkan hasil penilaian kapabilitas APIP yang dilakukan Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan tanggal 11-14 Oktober 2017 dengan hasil penilaian kapabilitas berada pada **Level 2**.

Pada tahun 2018, berdasarkan hasil penjaminan kualitas atas penilaian mandiri Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 Nomor: LQAPIP-821/PW21/6/2018 tanggal 21 Desember 2018 masih berada di **Level 2**.

Pada tahun 2019, berdasarkan surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: S-031/PW21/6/2020 tanggal 10 Januari 2020 perihal: Atensi atas Peningkatan Kapabilitas APIP Level 3 Hasil Validasi Penjaminan Kualitas, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada **Level 2 Plus/ Level 3 Dengan Catatan**.

Selanjutnya pada tahun 2022, berdasarkan surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: PE.09.03/LHE-1008/PW21/6/2022 tanggal 28 November 2022 perihal: Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada **Level 2 (dua)**.

Untuk mencapai Level 3 penuh, terdapat hal hal yang perlu mendapat perhatian dan ditindaklanjuti oleh Bupati Kepulauan Selayar sebagai berikut:

1. Meningkatkan penguatan dukungan terhadap pelaksanaan tugas APIP melalui pemberian akses informasi dalam pengawasan intern, memenuhi kebutuhan SDM, menyediakan anggaran yang memadai untuk meningkatkan kompetensi SDM (Diklat, *Work Shop* dan sertifikasi profesi auditor internal), menyediakan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi, serta pembiayaan operasional pengawasan intern;
2. Meningkatkan kematangan pengelolaan risiko dan mendorong APIP mengimplementasikan Kapabilitas APIP Level 3 dengan melakukan penilaian efektivitas pengelelolaan risiko pemerintah daerah;
3. Mendorong Tim Pengawas (*Management Oversight*) APIP untuk mereviu dan mengevaluasi kinerja APIP secara berkala;

4. Menginstruksikan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk:
 - 1) Meningkatkan praktik-praktik yang baik sebagaimana kapabilitas APIP Level 3 dengan mengimplementasikan *Key Process Area* (KPA) secara baik dan terus-menerus (*Institutionalized*), serta mulai mempercepat pencapaian level 3 kapabilitas APIP penuh;
 - 2) Meningkatkan kapabilitas SDM melalui diklat dan sertifikasi profesi auditor internal (seperti QIA, CIA, CGAP, CFE, dll);
 - 3) Menyusun perencanaan pengawasan berbasis risiko berupa pemutakhiran peta auditan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis risiko;
 - 4) Menyelaraskan perencanaan kegiatan tahunan, penetapan target kinerja, dan penganggaran (*business plan*) APIP (RKT, RKA, IKU Level 3, TAPKIN) dengan prioritas Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis risiko;
 - 5) Pelaksanaan penugasan individual APIP agar diperankan oleh SDM yang terlatih, mengacu pada Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) yang telah disetujui Kepala Daerah, disertai pengelolaan kualitas dengan penerapan kendali mutu sesuai standar audit sampai dengan monitoring tindak lanjutnya;
 - 6) Menuangkan rencana penugasan audit kinerja ke dalam PKPT dan mengimplementasikan pelaksanaannya dengan memperhatikan risiko auditan yang mencakup penilaian atas kehematan, efisiensi dan efektifitas dari operasi, aktifitas atau program pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
 - 7) Menuangkan rencana penugasan pemberian jasa konsultasi/ *advisory service* ke dalam PKPT;
 - 8) Menyusun laporan ikhtisar hasil pengawasan semester I dan semester II tahun berjalan;

9) Berkoordinasi dengan Perwakilan BPKP Provisi Sulawesi Selatan dalam rangka pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

• **Indikator Kinerja 2: Score Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Score Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	Level 3	Tercapai
	Nilai	3.0	3.002	Tercapai

Berdasarkan Surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 29 November 2022, nomor: PE.05.02/LEV-1038/PW21/3/2022, perihal Hasil Penilaian Cepat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (Terdefenisi) dengan nilai 3,002 dan skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 2,850 serta skor IEPK sebesar 2,766.

Dari hasil penilaian tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar belum sepenuhnya mampu mengarahkan pada pencapaian tujuan organisasi;
2. Manajemen Risiko Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar belum sepenuhnya diimplementasikan dan dijadikan dasar dalam penilaian kinerja serta belum memanfaatkan informasi terkait risiko dalam pengambilan keputusan;

3. Instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar belum memiliki kebijakan risiko kemitraan;
4. Sebagian besar OPD belum memiliki *risk register* terkait *fraud*/pencegahan korupsi;
5. Belum dilakukan reviu atas proses manajemen risiko oleh APIP;
6. Evaluasi Internal terhadap OPD belum maksimal.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, disarankan kepada Bupati Kepulauan Selayar agar:

1. Mengupayakan langkah-langkah yang optimal dalam pencapaian tujuan organisasi di Pemerintah Daerah
2. Mendorong penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan seluruh kegiatan yang ada di OPD dan menjadikan dasar dalam penilaian kinerja serta memanfaatkan informasi terkait risiko dalam pengambilan keputusan;
3. Menginstruksikan kepada kepala OPD untuk membuat:
 - a) Kebijakan manajemen risiko terkait risiko kemitraan
 - b) Membuat *risk register* terkait *fraud*/korupsi
4. Menginstruksikan Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar agar:
 - a) Melakukan reviu proses pelaksanaan manajemen risiko di seluruh OPD secara berkala
 - b) Melakukan evaluasi internal untuk menilai keberhasilan program dan kegiatan setiap OPD

Uraian di atas menggambarkan keberhasilan namun di sisi lain juga menunjukkan kegagalan dalam pencapaian target yang disebabkan oleh beberapa permasalahan, di antaranya:

1. Belum dipenuhinya usul kebutuhan jumlah SDM dan kompetensinya untuk melaksanakan kegiatan pengawasan sehingga penugasan pengawasan belum seluruhnya berbasis kompetensi;
2. Terbatasnya anggaran untuk menunjang kelancaran tugas bidang pengawasan baik kegiatan kegiatan operasional pengawasan maupun kegiatan dalam rangka peningkatan sumber daya

manusia aparatur pengawasan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Auditor maupun pendidikan teknis substantif lainnya.

3. Kurangnya pemahaman tentang SPIP;
4. Kurangnya komitmen OPD dalam mengedepankan akuntabilitas dari sisi kinerja sehingga akuntabilitas kinerja belum mendapat perhatian yang besar.
5. Belum adanya penetapan sanksi yang tegas bagi OPD yang tidak menerapkan akuntabilitas kinerja;
6. Adanya keterbatasan kapabilitas SDM di bidang akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah serta;
7. Masih belum terintegrasinya Sistem AKIP dengan sistem perencanaan dan sistem penganggaran.

Untuk meningkatkan capaian kinerja dimasa mendatang maka perlu menetapkan beberapa kebijakan strategis, antara lain dengan :

1. Peningkatan anggaran secara bertahap setiap tahun anggaran;
2. Penambahan kuantitas aparatur pengawasan melalui pelaksanaan diklat teknis dan fungsional bagi aparatur tata laksana pengawasan dan pegawai baru;
3. Menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi tindak lanjut rekomendasi BPKP terkait peningkatan level kapabilitas APIP;
4. Mendorong setiap pejabat fungsional untuk menjadi anggota profesi dan mengikuti kegiatan organisasi profesi;
5. Mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan untuk mengelola Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan yang dilakukan;
6. Meningkatkan pengawasan terhadap pengimplementasian SPIP dan Penerapan SAKIP.

Pengukuran kinerja kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 dapat diuraikan pada tabel berikut:

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2022

Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Ke giatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 7/6 *100		10 = 8/5 *100		
		INSPEKTORAT DAERAH			11.630.974.116		10.064.083.400		9.430.852.616		9.430.852.616		93,71		81,08	
1	Meningkatnya Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja	72,31%	7.547.751.070		6.000.696.000	98,42%	5.905.647.567	98,42%	5.905.647.567		98,42		78,24	
			Persentase Peningkatan Laporan Capaian dan Keuangan	95,00%												
		Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja yang tersusun	100%	35.200.000	100%	17.820.000	79,16%	14.106.200	79,16%	14.106.200			79,16		40,07

NO	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja	3 Dokumen	7.200.000	2 Dokumen	4.880.000	94,67%	4.620.000	94,67%	4.620.000		94,67		64,17
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-INSPEKTORAT DAERAH	Tersusunnya Dokumen RKA-DPA INSPEKTORAT DAERAH	1 Dokumen	4.500.000	1 Dokumen	2.675.000	73,83%	1.975.000	73,83%	1.975.000		73,83		43,89
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-INSPEKTORAT DAERAH	Tersusunnya Dokumen RKAP-DPAP INSPEKTORAT DAERAH	1 Dokumen	4.500.000	1 Dokumen	2.675.000	73,83%	1.975.000	73,83%	1.975.000		73,83		43,89
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.500.000										0,00
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 Dokumen	4.500.000										0,00

NO	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Ke- giatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
			Perubahan DPA-SKPD												
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja INSPEKTORAT DAERAH	Tersusunnya Laporan Ikhtisar	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	2.900.000	65,04%	1.886.200	65,04%	1.886.200		65,04		37,72
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Lakip INSPEKTORAT DAERAH	3 Laporan	5.000.000	1 Dokumen	4.690.000	77,83%	3.650.000	77,83%	3.650.000		77,83		73,00
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat Daerah	100%	5.090.496.954	100%	4.089.406.000	99,04%	4.050.038.257	99,04%	4.050.038.257		99,04		79,56
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	60 Orang/ Bulan	5.084.496.954	1 Tahun	4.085.406.000	99,04%	4.046.038.257	99,04%	4.046.038.257		99,04		79,58

NO	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Ke giatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun INSPEKTORAT DAERAH	Tersusunnya Laporan Keuangan INSPEKTORAT DAERAH	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	4.000.000	100,00%	4.000.000	100,00%	4.000.000		100,00		66,67
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat Daerah	100%	601.508.506	100%	400.000.000	99,21%	396.820.000	99,21%	396.820.000		99,21		65,97
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6 Paket	50.000.000										0,00
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah APIP bertifikat sesuai keahlian	40 Orang	450.000.000	30 Orang	375.000.000	99,15%	371.820.000	99,15%	371.820.000		99,15		82,63

NO	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		Bimbingan Teknik Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya In House Training Bagi Tenaga Pemeriksa dan Aparatur	40 Orang	101.508.506	40 Orang	25.000.000	100,00%	25.000.000	100,00%	25.000.000	100,00		24,63	
3	Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	100%	608.810.000	100%	573.860.000	96,65%	554.635.000	96,65%	554.635.000	96,65		91,10	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas baik Roda Empat dan Roda Dua yang diperadakan untuk Dinas Perorangan maupun Operasional	1 Unit	302.710.000	1 Unit	335.000.000	94,27%	315.800.000	94,27%	315.800.000	94,27		104,32	

NO	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Ke giatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		Pengadaan Mebel	Jenis dan Jumlah Mebeleur yang dibeli	5 Unit	120.000.000	10 Unit	36.690.000	100,00%	36.690.000	100,00%	36.690.000		100,00		30,58
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis dan Jumlah Peralatan Gedung Kantor dan Mesin yang dibeli	12 Unit	186.100.000	45 Unit	202.170.000	99,99%	202.145.000	99,99%	202.145.000		99,99		108,62
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	917.830.000	100%	674.910.000	96,26%	649.699.620	96,26%	649.699.620		96,26		70,79
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksannya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Laporan	180.297.000	1 Tahun	103.297.000	93,39%	96.464.220	93,39%	96.464.220		93,39		53,50
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	737.533.000	1 Tahun	571.613.000	96,78%	553.235.400	96,78%	553.235.400		96,78		75,01

NO	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Ke giatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPMD	100%	293.905.610	100%	244.700.000	98,22%	240.348.490	98,22%	240.348.490		98,22		81,78
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25 Unit	156.376.493	18 Unit	153.540.000	97,17%	149.188.490	97,17%	149.188.490		97,17		95,40
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya pemeliharaan peralatan dan mesin dalam Kondisi Baik	35 Unit	42.669.117	35 Unit	16.300.000	100,00%	16.300.000	100,00%	16.300.000		100,00		38,20
		Pemeliharaan/Reha bilasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Meningkatnya Pemeliharaan Gedung Kantor dan bangunan lainnya dalam Kondisi Baik	3 Unit	94.860.000	1 Gedung dan Halaman	74.860.000	100,00%	74.860.000	100,00%	74.860.000		100		78,92

NO	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
4	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 4	3.566.967.490	3	3.581.397.400	87,38%	3.129.327.849	87,38%	3.129.327.849	87,38	87,73		
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Obrik yang diawasi	100%	2.927.328.590	100%	2.903.732.500	91,09%	2.645.130.600	91,09%	2.645.130.600	91,09	90,36		
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang diawasi capaian kinerjanya	60 Laporan	680.018.000	46 Laporan	589.966.500	100,00%	589.966.500	100,00%	589.966.500	100,00	86,76		
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang diawasi realisasi keuangannya	330 Laporan	832.947.000	100 Laporan	767.893.400	100,00%	767.893.400	100,00%	767.893.400	100,00	92,19		
		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah OPD yang direviu Laporan Kinerjanya	27 Laporan	183.680.000	32 Laporan	144.756.000	100,00%	144.756.000	100,00%	144.756.000	100,00	78,81		

NO	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Ke giatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah OPD yang direviu Laporan Keuangan	1 Laporan	60.923.000	1 Laporan	37.148.000	100,00%	37.148.000	100,00%	37.148.000		100,00		60,98
		Pengawasan Desa	Jumlah Desa yang diawasi realisasi keuangannya dan Pelaksanaan Kinerjanya	144 Laporan	879.775.490	113 Laporan	1.177.097.000	80,55%	948.115.100	80,55%	948.115.100		80,55		107,77
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Obrik tindak lanjut rekomendasi perbaikannya	45 Dokumen	289.985.100	1 Laporan	186.871.600	84,15%	157.251.600	84,15%	157.251.600		84,15		54,23
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengawasan Khusus yang terselenggara	100%	639.638.900	100%	677.664.900	71,45%	484.197.249	71,45%	484.197.249		71,45		75,70
		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Aksi Pengawasan Khusus	60 Laporan	639.638.900	40 Obrik Pemeriksaan	677.664.900	82,13%	484.197.249	82,13%	484.197.249		71,45		75,70
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,5	516.255.556	3	481.990.000	92,96%	395.877.200	92,96%	395.877.200		82,13		76,68

NO	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase kebijakan teknis yang ditetapkan	100%	93.333.000	100%	79.257.500	92,96%	73.678.700	92,96%	73.678.700	92,96		78,94	
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan bidang Pengawasan yang dirumuskan	3 Rekomendasi	93.333.000	3 Dokumen	79.257.500	92,96%	73.678.700	92,96%	73.678.700	92,96		78,94	
		Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pelayanan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	100%	422.922.556	100%	402.732.500	80,00%	322.198.500	80,00%	322.198.500	80,00		76,18	
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah OPD yang difasilitasi melalui pendampingan / asistensi dalam urusan pemerintahan daerah sesuai bidangnya	38 Perangkat Daerah	70.000.000	5 Laporan	72.555.000	80,03%	58.065.000	80,03%	58.065.000	80,03		82,95	

NO	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah OPD yang difasilitasi melalui pendampingan / asistensi / verifikasi / penilaian dalam penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	38 Perangkat Daerah	33.570.000	1 Laporan	34.105.000	99,12%	33.805.000	99,12%	33.805.000	99,12		100,70	
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah OPD yang difasilitasi melalui koordinasi/ monitoring / evaluasi / verifikasi / dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi	6 Kegiatan	111.352.556	5 Kegiatan	137.427.000	91,05%	125.127.000	91,05%	125.127.000	91,05		112,37	
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah OPD yang difasilitasi melalui pendampingan/ asistensi / verifikasi / dalam penegakan Integritas	38 Perangkat Daerah	208.000.000	3 Laporan	158.645.500	66,31%	105.201.500	66,31%	105.201.500	66,31		50,58	

2.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH

Pengukuran kinerja dilakukan setelah penetapan indikator kinerja, standar kinerja dan pengumpulan data kinerja. Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator input/masukan, proses, output/keluaran, outcome/hasil dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dan kualitas pencapaian sasaran.

Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator *benefit*/manfaat, dan *impact*/dampak dapat diukur pada akhir periode selesainya suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan. Hal ini terkait pada pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur indikator kinerja dampak.

Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen rencana kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Pengukuran kinerja kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022, dapat diuraikan pada tabel berikut:

PENCAPAIAN KINERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

No	Sasaran Strategis	Indikator	Program/Kegiatan	Target		Realisasi	
				Persentase	Alokasi Anggaran	Persentase	Alokasi Anggaran
1	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	Indeks kepuasan layanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:	63,03%	6.000.696.000,00	62,03%	5.905.647.567,00
				83%		81,68%	
2	Meningkatnya Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	Nilai Sakip OPD	1 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	17.820.000,00	79,16%	14.106.200,00
			2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	4.089.406.000,00	99,04%	4.050.038.257,00
			3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	400.000.000,00	99,21%	396.820.000,00
3	Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Laporan Keuangan Daerah yang Tersaji sesuai SAP	4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	573.860.000,00	96,65%	554.635.000,00
			5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	674.910.000,00	96,26%	649.699.620,00
			6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	244.700.000,00	98,22%	240.348.490,00

No	Sasaran Strategis	Indikator	Program/Kegiatan	Target		Realisasi	
				Persentase	Alokasi Anggaran	Persentase	Alokasi Anggaran
4	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Program Penyelenggaraan Pengawasan:	Level 3	3.581.397.400,00	Level 2 Plus/ Level 3 Dengan Catatan	3.129.327.849,00
			1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100%	2.903.732.500,00	91,09%	2.645.130.600,00
			2 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100%	677.664.900,00	71,45%	484.197.249,00
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi:	Level 3	481.990.000,00	Level 3 (Terdefenisi)	395.877.200,00
		1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	100%	79.257.500,00	92,96%	73.678.700,00	
		2 Pendampingan dan Asistensi	100%	402.732.500,00	80,00%	322.198.500,00	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka kinerja yang dicapai ternyata belum optimal. Hal tersebut dapat diukur dari beberapa segi, yaitu:

1. Standar kompetensi SDM inspektorat secara kualitas belum sepenuhnya terpenuhi hal ini ditandai dengan kapabilitas tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan belum dinilai secara memadai dan berpotensi masih berada level 2 plus/level 3 dengan catatan.
2. Peningkatan kapasitas SDM (auditor & P2UPD) tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan Inspektorat Daerah. Tenaga fungsional yang ada saat ini (bezetting) sebanyak 21 orang dari kebutuhan sebanyak 67 orang. Hal ini memperlihatkan bahwa selisih kebutuhan dengan bezetting sebanyak 46 orang.
3. Masih terdapat objek pengawasan yang belum diperiksa dalam pelaksanaan PKPT maupun dengan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Hal ini disebabkan karena PKPT Tahun 2022 belum berdasarkan dengan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR)
4. Belum memadainya sarana dan prasarana penunjang pengawasan.
5. Masih rendahnya tindak lanjut hasil pengawasan internal maupun eksternal pemerintah.
6. Masih rendahnya hasil evaluasi LAKIP Kabupaten dan OPD
7. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Internal di SKPD.
8. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pengawasan yang ditandai dengan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan penyimpangan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi serta mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kepulauan Selayar, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar mengambil peran pada misi pertama yaitu **“Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan”**. Guna merealisasikan hal tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar mengambil peran dari beberapa segi, yaitu:

1. Mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik dengan mengedepankan peran sebagai *quality assurance*.
2. Meyakinkan pendekatan aspiratif, partisipatif dan transparan dalam tata kelola pemerintahan dengan memperkuat peran sebagai *consulting partner* bagi semua OPD.
3. Menjaga percepatan pembangunan infrastruktur dengan berperan sebagai lembaga konsultatif.
4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem dan mekanisme peraturan perundangan pada auditan;
5. Terwujudnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang profesional, berkualitas dan akuntabel;
6. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintah;
7. Sinergitas antar aparat pengawasan intern pemerintah dalam mewujudkan terlaksananya pengawasan intern pemerintah yang optimal.

Faktor penghambat yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati :

1. Sumber Daya Manusia:
 - a. Masih Kurangnya Sertifikasi yang berkaitan dengan kompetensi Bidang Pengawasan;
 - b. Belum seimbang rasio antara tenaga pengawasan dengan obyek pemeriksaan;
 - c. Masih kurangnya Bimbingan Teknis maupun diklat

kompetensi baik bagi Pejabat Fungsional Auditor dan PPUPD.

2. Sarana dan Prasarana:
 - a. Masih belum memadainya perangkat pendukung teknologi informasi dan alat bantu ukur yang berbasis teknologi untuk menunjang pelaksanaan pengawasan;
 - b. Masih belum memadainya sarana mobilitas pelaksanaan pengawasan;
 - c. Masih belum memadainya fasilitas dan sarana prasarana gedung dan kantor yang representatif.
3. ANGGARAN: Belum terpenuhinya Anggaran penunjang pengawasan dari APBD Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 0.75% dari total APBD sesuai dengan kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan Surat dari Menteri Dalam Negeri perihal Penguatan Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pemerintahan Daerah. Alokasi anggaran pengawasan yang dimaksudkan tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan.

Langkah-langkah yang direncanakan untuk Mengatasi Hambatan:

1. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas SDM yang ada melalui kerjasama berupa Bimbingan Teknis dan Diklat Kompetensi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dan Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri;
2. Mengoptimalkan koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar maupun Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri untuk memfasilitasi pendidikan dan latihan bagi Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD) dan Jabatan Fungsional Auditor (JFA);
3. Meningkatkan kerjasama teknis dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan untuk optimalisasi:
 - a. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

- b. Tindak lanjut hasil temuan BPK-RI;
 - c. Pemeriksaan tujuan tertentu untuk penanganan temuan yang bersifat strategis;
 - d. Perumusan regulasi kebijakan Sistem Pengendalian Internal;
 - e. Membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
4. Mengusulkan secara bertahap kebutuhan SDM pemeriksa melalui Analisis Beban Kerja (ABK) yang telah ditetapkan sesuai dengan kompetensi dalam bidang pengawasan;
 5. Mengadakan Bimbingan teknis maupun Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) kompetensi dalam bidang pengawasan bagi Pejabat Fungsional Auditor dan PPUPD;
 6. Mengoptimalkan anggaran yang tersedia seefektif dan seefisien mungkin dalam rangka peningkatan kinerja aparatur pengawasan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar;
 7. Mengusulkan secara bertahap peningkatan anggaran dalam tiap tahun anggaran sesuai dengan target kinerja pengawasan maupun kebijakan pengawasan Kementerian Dalam Negeri yang didasarkan pada Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH

A. TUJUAN

Tujuan merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai dalam 1 (satu) periode tertentu. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang muncul. Tujuan juga harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi yang dimiliki oleh Inspektorat.

Bertolak dari visi dan misi Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah ditetapkan serta untuk mengatasi isu-isu strategis yang telah dikemukakan maka ditetapkan tujuan, sebagai berikut:

Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan, maka Inspektorat mewujudkan misi ke-1 Kabupaten Kepulauan Selayar.

Misi 1: Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan,

maka tujuan pembangunan/pelayanan jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah:

- 1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**
- 2. Meningkatkan Kapasitas Manajemen Pengawasan terhadap Kualitas Hasil Pengawasan.**

B. SASARAN

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur. Spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi Inspektorat, atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan.

Sasaran yang ditetapkan merupakan sasaran pada level eselon II, yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan medium term outcome atau outcome untuk jangka menengah, dengan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu:

- a. Meningkatnya Nilai SAKIP Inspektorat Daerah
- b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat
- c. Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

2. Meningkatkan Kapasitas Manajemen Pengawasan terhadap Kualitas Hasil Pengawasan, dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu:

- Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun ke depan, dan dengan sumber dana APBN/APBD, diuraikan berikut ini:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kegiatan:

1.1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA Perubahan SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 10) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 11) Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarakan Tugas dan Fungsi
 - 3) Bimbingan Teknik Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pengadaan Mebel
 - 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. Program Penyelenggaraan Pengawasan, dengan kegiatan:

2.1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal

- 1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
- 2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
- 3) Reviu Laporan Kinerja
- 4) Reviu Laporan Keuangan
- 5) Pengawasan Desa
- 6) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

2.2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

- 1) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, dengan kegiatan:

3.1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

3.2. Pendampingan dan Asistensi

- 1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
- 2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
- 3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- 4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

BAB IV

PENUTUP

Inspektorat Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan evaluasi terhadap pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah merupakan dokumen perencanaan Inspektorat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Tahunan ini digunakan dalam membuat rencana operasional kegiatan sebagai komitmen Pimpinan untuk menyediakan sumber daya serta proses penganggaran yang selanjutnya juga digunakan untuk Service Agreement atau Komitmen Kinerja ataupun Performance Agreement yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar untuk pemantauan Program / Kegiatan di Tahun 2023.

Demikian Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 ini disusun untuk dijadikan pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran APBD Tahun 2023.

Benteng, 02 Januari 2023
INSPEKTUR DAERAH,



H.A.R. KRIG MAGASSING, S.H., M.H.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19630727 199303 1 014